# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

# DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI



**TAHUN ANGGARAN 2022** 



#### KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan 2022 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

- Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;
- Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama Tahun 2022 ini akan menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

> Jakarta. Januari 2023

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,

RINA P. SOEMARNO



## DAFTAR ISI

KA	T A PENGANTAR	2
DA	FTAR ISI	3
RIN	IGKASAN EKSEKUTIF	4
BAI	B I	6
PEI	NDAHULUAN	6
A.	DASAR HUKUM	6
B.	TUGAS DAN FUNGS I DEPUTI BIDANG KOORDINAS I POLITIK LUAR NEGERI	6
C.	STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGE	RI.8
D.	ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
E.	PERMASALAHAN UTAMA	9
F.	SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA	11
BA	B II	12
PEI	RJANJIAN KINERJA	12
A.	RENCANA STRATEGIS	12
	1. Visi, Misi dan Tujuan	12
	2. Strategis Kebijakan	13
B.	PERJANJIAN KINERJA	13
BA	B III	16
AKI	UNTABILITAS KINERJ	16
A.	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	
B.	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA T.A. 2022	
	a. Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negerib. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	
	c. Jumlah Forum Internasional	
C.	EFISIENSI	
D.	REALISASI ANGGARAN	
	B IV	
	NIITIP	41



#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Capaian Kinerja Tahunan 2022 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut:

Tabel 1 Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022

Sasaran	Indikatas Kinasia	Target	Realisasi	% Realisasi
Strategis	Indikator Kinerja	2022		Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%	119,89%	111,11%
lintas sektoral yang efektif;	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%	100%	111,11%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	78%	78,95%	101,22%
2. Pemenuhan Layanan	a. Nilāi SĀKIP	A (80.00)	BB (76,70)	95,88%
Dukungan	b. Nilai PMPRB	30	35,09	116%
Manajemen yang optimal	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%
	d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	85	100%



Pagu anggaran Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.950.524.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.716.302.484,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 97,38% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2022 Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	Jumlah	Realisasi	%
ABC: 001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.196.649.000	2.135.007.805	97,19 %
ABC.UUZ	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.939.869.000	1.857.384.051	95,75 %
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.077.703.000	2.033.417.520	97,87 %
ABC, 004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.402.030.000	1.363.327.660	97,24 %
	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.334.273.000	1.327.165.448	99,47 %
	Total =	8.950.524.000	8.716.302.484	97,38 %



# BAB I **PENDAHULUAN**

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilajan, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

#### A. DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 5. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

#### B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri



- 3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik:
- 4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
- 5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
- 6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika:
- 7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
- 8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN:
- 9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral:
- 10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
- 11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri;
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

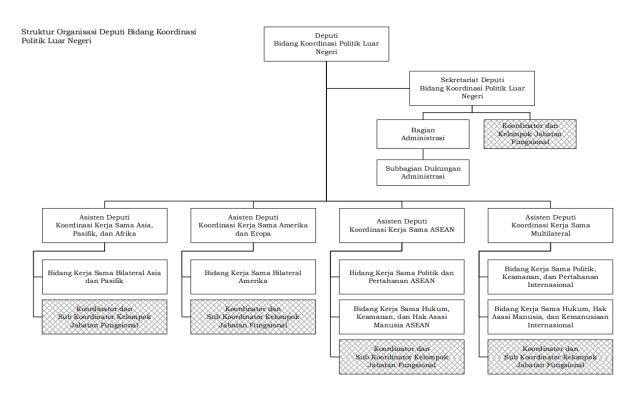
- 1. Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kementerian Luar Negeri;
- 3. Kementerian Pertahanan;
- 4. Kementerian Hukum dan HAM;
- 5. Kementerian Kominfo:
- 6. Kementerian PAN & RB;
- 7. Kejaksaan Agung;
- 8. Badan Intelijen Negara
- 9. Tentara Nasional Indonesia;
- 10. Kepolisian Negara RI;
- 11. Instansi lain yang dianggap perlu.



# C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR **NEGERI**

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor: 1 Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

- Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
  - Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
  - Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
  - Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN; C.
  - Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral;
  - Sekretaris Deputi
- Asisten Deputi dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, HAM dan Kemanuasiaan Internasional serta para analis kebijakan.
- Sekretariat Deputi, terdiri dari Sekretaris Deputi setingkat Eselon II dibantu oleh Perencana Ahli Madya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Perencana Ahli Muda, Analis Anggaran Muda, Arsiparis Muda, Kepala Sub Bagian Umum, Arsiparis Pertama, Pengadministrasi Umum, Pengelola Program dan Kegiatan, Pengevaluasi Program dan Kinerja dan Staf Tata Usaha.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidkoor Pollugri



#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

#### E. PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

1) Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.



- 2) Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional
- 3) Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui
- 4) Pada Aspek Sosial-budaya, Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.

Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kebijakan luar negeri terdapat target program prioritas, yaitu memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional.Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.



#### F. SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

# 1) Anggaran

Pagu Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Per 31 Desember TA 2022 setelah *Automatic Adjustment* (cadangan pemotongan) sebesar Rp8.338.515.000,- dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pagu Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.196.649.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.939.869.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.077.703.000
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.402.030.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	640,755,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	693,518,000
Total Angg	jaran Kedeputian Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2022	8.950.524.000

# 2) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

- 1. Sekretariat Deputi;
  - 1.1. Bagian Administrasi
  - 1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
  - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
  - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
  - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
  - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN
  - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
  - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN;
  - 4.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral
  - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
  - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
  - 5.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6.1. Fungsional Tertentu;
  - 6.2. Fungsional Umum.



# BAB II PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya,penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Pollugri 2022-2024 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Pollugri adalah

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri

Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharakan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
- b. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

**Tujuan** yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2018 adalah

- a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;
- b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisian di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.



# 2. Strategis Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama Deputi BidKoor Pollugri

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
1.	Koordinasi, Sinkronisasi,	a.	Persentase (%) capaian target pembangunan
	dan Pengendalian		bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah
	Bidang Politik Luar		Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai
	Negeri lintas sektoral		dokumen perencanaan nasional
	yang efektif;	b.	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang
			dapat mendukung capaian target pembangunan
			bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen
			perencanaan nasional
		C.	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang
			Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti
2.	Pemenuhan Layanan	e.	Nilai SAKIP
	Dukungan Manajemen	f.	Nilai PMPRB
	yang optimal	g.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
		h.	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan
			Anggaran Deputi

#### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi,     Sinkronisasi, dan     Pengendalian     Bidang Politik	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%
Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	78%



Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target
2.	Pemenuhan	d.	Nilai SAKIP	Α
	Layanan	e.	Nilai PMPRB	30
	Dukungan	f.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	Manajemen	g.	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran	85
	yang optimal		Deputi	

Tabel 2.3 Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022

	Indikator Kinaria						
	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja					
1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	<ol> <li>Indeks Pelayanan &amp; Perlindungan WNI di Luar Negeri;</li> <li>K/L Teknis: Kementerian Luar Negeri Target 2022: 88</li> <li>Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;</li> <li>K/L Teknis: Kementerian Luar Negeri Target 2022: 3,90</li> <li>Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral</li> <li>K/L Teknis: Kementerian Luar Negeri Target 2022: 13</li> </ol>					
2)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	Perhatian besar pada dokumen perencanaan nasional mencakup isu-isu:  1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI;  2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;  3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral;  4) Terorisme;  5) Transnational Crime;  6) Perdagangan manusia;  7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,  8) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan  9) Keamanan siber.					
3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinator Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait					
,	Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri					
5)	Nilai PMPRB	Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam bersama Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri					



	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
6)	Indeks Kepuasan	Penilaian atas pelayanan Kesekretariatan Lingkungan
	Pelayanan Sekretariat	Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
	Deputi	
7)	Indeks Kualitas	Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas
	Perencanaan Kinerja dan	pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di
	Anggaran Deputi	Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar
		Negeri

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

- Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
- 2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
- 3. Koordinasi kerjasama ASEAN
- 4. Koordinasi kerjasama Multilateral
- 5. Layanan Kesekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp8.338.515.000,- (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

S	asaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian 2022
	(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengen- dalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang	a.	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%	100%	111,11%
	efektif;	b.	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%	100%	111,11%
		C.	rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	78%	78,85%	101,22%
2.	Pemenuhan	d.	Nilai SAKIP	Α	76,7 (BB)	95,90%
	Layanan Dukungan	e.	Nilai PMPRB	30	35,09	116%
	Manajemen yang optimal	f.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%
	, <del>3</del> - 5	g.	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	85	100%



#### B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TA 2022

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif

Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.



Gambar 3.1. Menko Polhukam menghadiri pelantikan Presiden terpilih Republik Demokrat Timor Leste pada 19 Mei 2022.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kedeputian Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:

- a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri;
- b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;
- c) Jumlah Forum Internasional

Tabel 3.2.

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian 2022			
a)	Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri	90	93,80	104,22%			
b)	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,90	4,06	104,10%			
c)	Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	74	112	151,35%			
	Rata – rata Realisasi 2022 =						
	Target Capaian 2022 =						
	Persentase Capaian 2022 =						





Gambar 3.2. Rapat Koordinasi pembahasan capaian target pembangunan Bidang Pollugri tahun 2022 antara Deputi Bidkoor Pollugri dengan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas

### a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri;

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
	2022	2022	2022
Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri	90	93,80	104,22%

Penyelesaian kasus pelindungan WNI di Luar Negeri pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022, baik yang diberikan oleh Perwakilan Kementerian Luar Negeri di luar negeri maupun K/L di dalam negeri, telah menangani 35.149 kasus dan 30.894 diantaranya telah selesai ditangani. Rincian kasus: 4.687 kasus khusus telah selesai dari total 4.910 kasus dan 26.207 kasus umum telah selesai ditangani dari total 30.239 kasus.

Sebanyak 19.421 orang telah menerima manfaat dari program dan kegiatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri di Pusat. Data tersebut diperoleh dari penyelesaian kasus-kasus WNI bermasalah di luar negeri (pembebasan sandera, repatriasi ABK dan PMI, pemulangan WNI Sakit, pemulangan jenazah), penanganan Penyelesaian Kasus WNI di dalam negeri untuk penyelesaian kasus WNI di luar negeri (family engagement, pengurusan dokumen, pendampingan PMI), peningkatan Kapasitas dalam Pelayanan Kekonsuleran di Perwakilan RI, pelatihan Aparatur terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI, dan sosialisasi Penyadaran Publik.



Sejak awal 2020, hampir seluruh negara di dunia menghadapi wabah infeksi virus corona baru yang membuat pemerintah masing-masing sibuk berupaya mencegah penularan lebih lanjut demi keselamatan warga negara. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) sejak awal selalu menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintah.

Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri, "Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI" diperoleh berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengukuran capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI melalui 4 (empat) indikator, yaitu:

- 1. Sub IKU-1: Persentase Penyelesaian Kasus WNI di luar negeri,
- 2. Sub IKU-2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
- 3. Sub IKU-3: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI di luar negeri, dan
- 4. Sub IKU-4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri.

Pengukuran Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dilakukan pada akhir Tahun 2022. Kemenko Polhukam tidak secara langsung berkontribusi dalam pengukuran dan penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI. Hal tersebut dilakukukan melalui Sub IKU-1, Persentase Penyelesaian Kasus WNI di luar negeri dan Sub IKU-4, Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri.

Dalam rangka mendukung Kemlu selaku focal point dalam pencapaian peningkatan Persentase Penyelesaian Kasus WNI di luar negeri, hingga TA 2022, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelayanan, perlindungan dan penanganan WNI di luar negeri, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu keamanan yang berdampak pula pada keamanan nasional. Rekomendasi secara spesifik memuat langkah-langkah penanganan WNI bermasalah (WNI-b) yang terkait kasus pelanggaran hukum di luar negeri, termasuk keterlibatan dalam terorisme. Koordinasi dan sinkronisasi tersebut antara lain:

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan WNI yang terkait terorisme/radikalisme di Irak, Turki dan Afganistan, dan langkah mitigasi terhadap dampak.
- 2. Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Isu Beasiswa Otonomi Khusus Orang Asli Papua di Luar Negeri.
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Beasiswa Otonomi Khusus Orang Asli Papua di luar negeriKoordinasi penanganan WNI memuat prinsip operasi dan langkah teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam menangani WNI yang terkait kasus terorisme di Malaysia dan Filipina, serta penanganan WNI di Afghanistan, Irak dan Turki.
- 4. Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Pemulangan FTF dari Suriah oleh Pemerintah Malaysia.

Sebagai catatan, penanganan WNI terkait kasus terorisme di luar negeri dilakukan dengan dasar *case by case* mengingat sensitivitas isu dan perbedaan sistem penanganan warga negara asing di setiap negara.



Dalam rangka pencapaian peningkatan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri, hingga TA 2022, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi Kegiatan kampanye penyadaran publik yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain:

1. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri mengisi pidato kunci pada 'The 7th Interfaith Dialogue: Religion in Colonization and Decolonization: Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, and Transformation' pada 11 Juni 2022 di kota Den Haag, Belanda.





Gambar 3.3. Menko Polhukam melaksanakan *The 7th Interfaith Dialogue* pada 11 Juni 2022 di kota Den Haag, Belanda

Dialog ini berlangsung atas kerjasama Konsorsium Hubungan Muslim dan Kristen Indonesia-Belanda (NICMCR), Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda, dan KBRI Belanda. Dialog yang amat strategis dan konstruktif ini berlangsung di sebuah gereja di pusat Kota Den Haag, yaitu Gereja Kloosterkerk. Selain delegasi Kemenko Polhukam, hadir pula Mas Ulil Absar Abdalla dari PBNU, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayerfas, Utusan Khusus urusan Agama dan Kepercayaan Belanda, Jos Douma, Ketua Konsorsium untuk Hubungan Muslim dan Kristen Belanda-Indonesia (NICMCR), Corrie van der Ven, dan teman-teman dari PCINU Belanda.

2. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri berdiskusi perihal permasalahan dan penanganan perlindungan WNI di Malaysia, 9 November 2022.





 Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri menghadiri undangan Dialog keagamaan antara Menko Polhukam dengan Para Ulama pada 30 November 2022 di India.



Sesuai dokumen RPJMN 2019-2024 target tahun 2022 Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI adalah 88. Atas pertimbangan bahwa capaian 2021 yang telah mencapai >90% maka target 2022 direvisi menjadi 90.

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target antara lain adalah Pandemi Covid-19. Pandemi memicu peningkatan masalah dan kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI harus dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau diubah formatnya Tahun 2022. Perubahan ini sangat mempengaruhi hasil dan efektivitas berbagai kegiatan. Lebih lanjut, tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu:

- banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor pemerintahan dsb) yang menghambat proses penyelesaian kasus,
- 2. ketersediaan moda transportasi repatriasi,
- 3. keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, dan
- proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada pada kementerian/lembaga/instansi dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri



Grafik 3.1.

Grafik Tren Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 20182022



Pandemi Covid-19 yang masih menjangkiti akan terus mempengaruhi WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri serta cara WNI bepergian ke luar negeri. Kontraksi ekonomi dan sosial akan terus berlangsung paling tidak hingga 1 tahun ke depan. Dapat diprediksikan WNI akan terus mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan, keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi dan sosial tersebut. Apabila kegiatan pelindungan WNI di luar negeri dan upaya menghadapi tantangan penyelesaian kasus dapat terus dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI pada tahun 2022 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi penyeimbang selain penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan pelindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pelindungan dan penguatan diplomasi pelindungan.

#### b) Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional;

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
	2022	2022	2022
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,90	4,06	104,10%

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Pengukuran Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional dilakukan melalui survei pada 3 Dimensi, yaitu :

1. Tourism and Socio Culture, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia



- 2. Governance and Rule of Lawyakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia ;
- 3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;

Penghitungan target "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri.

Sampai dengan tanggal 17 Desember 2022, telah terjaring 12.806 responden yang telah mengisi Survei Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional, yang terdiri dari 8.409 responden survei daring dan 4.397 responden survei luring. Para responden terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta counterpart terkait lainnya. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai per dimensi sebagai berikut:

Tourism and Socio Culture: 4,43
 Governance and Rule of Law: 3,93

3. Economy: 3,81

Grafik 3.2.

Grafik Tren Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2018-2022



Terdapat kenaikan capaian Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional. Kenaikan ini merupakan buah usaha diplomasi Indonesia terhadap isu-isu dunia, seperti penanganan Covid, perlindungan WNI di luar negeri, pemberantasan terorisme, penghormatan dan pelindungan HAM serta perlindungan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian, Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2022, hal tersebut



dilakukukan melalui peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang "Competency dan Fairness" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan pada pertemuan-pertemuan internasional sebagai berikut.

 Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri menyelenggarakan Pertemuan The 2nd India-Indonesia Security Dialogue (pertemuan IISD kedua) pada Kamis (17/3) di Jakarta. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Penasihat Keamanan Nasional Republik India, Ajit Doval. IISD adalah forum yang membahas peningkatan Kerjasama antara kedua negara di bidang politik dan keamanan.

Pada pertemuan IISD kedua ini, Menko Polhukam membahas pentingnya hubungan persahabatan dan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan India terutama dalam hal:

- a. Keamanan Kawasan dan Global
- b. Penanggulangan Terorisme
- c. Keamanan Maritim
- d. Kerja sama pertahanan dan
- e. Keamanan siber dan antariksa.



Gambar 3.4. Menko Polhukam dan NSA India menandatangani Memorandum Saling Pengertian untuk dialog keamanan

Pada akhir Pertemuan Ke-2 IISD, Menko Polhukam dan NSA India menandatangani Memorandum Saling Pengertian untuk dialog keamanan antara Menko Polhukan dan NSCS India sebagai dasar pelaksanaan mekanisme IISD selanjutnya.



2. Pada 14 Juni 2022, Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri berdialog dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB di kantor PBB Jenewa.

Menko Polhukam menekankan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penghormatan



HAM. bahkan tengah pandemi. Sementara KT HAM mengapresiasi kerja sama baik yang telah terialin antara Pemerintah Indonesia dan ΚT HAM Kantor PBB dalam memajukan penghormatan dan pelindungan HAM.

Gambar 3.5. Menko Polhukam bersama Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB di kantor PBB Jenewa

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yaitu:

- a. mutasi pegawai yang tinggi dan kurangnya transfer knowledge antar pejabat pengganti,
  - b. keterbatasan penguasaan Bahasa Inggris dari WNA di beberapa negara,
  - c. akses jaringan internet yang terbatas dan mahal di beberapa negara,
  - d. kesibukan WNA yang tidak memiliki waktu luang untuk pengisian survei.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembekalan bagi pejabat yang akan ditempatkan di Perwakilan.
- b. Meningkatkan koordinasi real time dengan perwakilan RI melalui pembentukkan grup Citra Indonesia,
- c. Menambah fitur pilihan bahasa asing pada survei daring,
- d. Melanjutkan penyebaran survei secara manual yang kemudian diinput dalam aplikasi.
- e. Penyederhaan pertanyaan survei untuk mempermudah pengisian.

# c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suati jabatan strategis pada Multilateral dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk ikut serta menyusun kebijakan Multilateral, menyusun dan melaksanakan program-program kerja Multilateral yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional



Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Penghitungan capaian Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral meliputi peran Indonesia dalam memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bereau, dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada Multilateral.

Tabel 3.3.

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
	2022	Tahun 2022	Tahun 2022
Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	74	112	151,35%

<sup>\*)</sup> Data dari Kemlu TA 2022. Capaian diperoleh dari Forum Kerja Sama Aspasaf, Amerop, ASEAN dan Multilateral.

Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pimpinan (baik Host, Co-Host, Chair, Co-Chair maupun dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Multilateral) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara lain berupa:

1. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri menyelenggarakan Pertemuan The 2nd India-Indonesia Security Dialogue (pertemuan IISD kedua) pada Kamis (17/3) di Jakarta. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Penasihat Keamanan Nasional Republik India, Ajit Doval. IISD adalah forum yang membahas peningkatan Kerjasama antara kedua negara di bidang politik dan keamanan.



Gambar 3.5. Menko Polhukam menyelenggarakan The 2nd India-Indonesia Security Dialogue pada 17 Maret 2022.



2. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri menyampaikan pernyataan Pemerintah Indonesia mengenai pemajuan pelaksanaan HAM di Indonesia pada Sesi ke-50 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Pada sidang tanggal 13 Juni 2022 itu, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Dewan HAM PBB dapat memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi, yaitu dengan memastikan setiap orang memiliki hak yang setara dalam menghadapi Covid dan pandemi selanjutnya, serta mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM. Indonesia telah meluncurkan National Human Rights Action Plan (Ranham) untuk tahun 2021 hingga 2025. Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 4 kelompok target utama yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat. Kemudian disampaikan bahwa 85% populasi telah mendapatkan jaminan Kesehatan, sebagai bagian dari target ketiga SDG hal ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen populasi. Indonesia juga terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem (extereme poverty) melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara serta rencana Indonesia dalam mencanangkan penghapusan extreme poverty pada 2024. Selanjutnya, disampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses meratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ratifikasi ini akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional.



Gambar 3.6. Menko Polhukam hadir pada Sesi ke-50 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss



- Usai berbicara di sidang UN, Delegasi Kemenko Polhukam bertemu dengan Presiden International Committee of the Red Cross (ICRC) Peter Maurer guna membahas peningkatan kerja sama Indonesia dengan ICRC dalam berbagai program kemanusiaan, yang selama ini telah terjalin dengan baik.
- 3. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri melakukan pertemuan Side Event Sidang Dewan HAM yang dilaksanakan atas kerjasama Komnas HAM RI dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, dengan tema Pemenuhan HAM di tengah Pandemi Covid-19. Acara pada tanggal 14 Juni 2022 ini dihadiri oleh berbagai organisasi internasional yang hadir di Jenewa dan secara daring dari negara masing-masing.



Gambar 3.7. Menko Polhukam memimpin pertemuan Side Event Sidang Dewan HAM dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa

4. Menko Polhukam bersama Deputi Bidkoor Pollugri memimpin delegasi RI pada pertemuan ke-25 Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (APSC Council), di Phnom Penh, Kamboja. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN merupakan bagian penting dari Masyarakat ASEAN guna membentuk kawasan yang aman dan damai serta menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, untuk bersama-sama membangun kawasan yang sejahtera. Selain itu, disampaikan juga penguatan mekanisme ASEAN dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan, termasuk pengelolaan Laut China Selatan sebagai Sea of Peace dan pentingnya implementasi ASEAN Outlook on the Indo Pacific, sebagai peningkatan kerja sama dalam membangun kepercayaan di kawasan Indo-Pasifik





Gambar 3.8. Menko Polhukam memimpin pertemuan 25<sup>TH</sup> ASEAN *Political – Security Community (Apsc) Council Meting* di phnom penh, cambodia

5. Deputi Bidkoor Pollugri bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri Australia menyelenggarakan Pertemuan ke-2 Senior Official Counter Terrorism Policy Forum (SOCTPF) 2022 di Bali, pada tanggal 19-20 Desember 2022. Pertemuan dipimpin bersama oleh Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam dan Deputy Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator Depdagri Australia, dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota Sub-Regional Meeting/SRM (Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand), dengan tema utama penanganan dan perlindungan anak terdampak terorisme.



Gambar 3.9. Pertemuan ke-2 Senior Official Counter Terrorism Policy Forum (SOCTPF) 2022 di Bali, 19-20 Desember 2022.

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional.

Rekomedasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target

pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional

Jumlah Rekomedasi Kedeputian Pollugri

Capaian = 100%



Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri 2022 capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional adalah sebagai berikut:

No.	Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada	Jumlah
	Dokumen Pembangunan Nasiona	Rekomendasi
1.	Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri	6
2.	Indeks Citra indonesia di dunia Internasional	7
3.	Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum	6
	Regional dan Multilateral	
	Total	19

- 19 (sembilan belas) rekomedasi kebijakan bidang Pollugri tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional, yaitu :
- 1) Mendukung Indeks Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  - a. Surat Menko Polhukam nomor R-2/LN.00.00/1/2021 tanggal 18 Januari 2022 terkait Penanganan WNI di Afghanistan, Irak dan Turki termasuk mitigasinya;
  - b. Surat Menko Polhukam nomor R-13/LN.00.00/4/2021 tanggal 31 Maret 2022 terkait Penanganan Isu Beasiswa Otonomi Khusus Orang Asli Papua di Luar Negeri;
  - c. Surat Menko Polhukam nomor B-45/LN.00.00/4/2022 tanggal 13 April 2022 mengenai penyelesaian keterlambatan pembayaran Beasiswa Otonomi Khusus Orang Asli Papua di luar negeri.
  - d. Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor R-79/LN.00.00/7/2022 tanggal 22 Juli 2022 Rekomendasi untuk Tanggapan Pemri terhadap Rencana Pemulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari Suriah oleh Pemerintah Malaysia;
  - e. Surat Menko Polhukam nomor B-141/LN.00.02/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Rekomendasi Kebijakan Mengkaji kembali Semua Instrumen Hukum mengenai TPPO baik ditingkat Nasional, Regional dan Internasional;
  - f. Surat Menko Polhukam nomor B-185/LN.00.01/12/2022 tanggal Desember 2022 Rekomendasi Isu Perkembangan Penanganan Diaspora Indonesia.
- Mendukung Indeks Citra indonesia di dunia Internasional. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  - a. Surat Sesmenko Polhukam nomor B-2071/LN.00.00/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 Surat Menko Polhukam nomor B-99/LN.00.00/9/2022 tanggal 2 September 2022 Rekomendasi untuk Sinkronisasi Posisi Pemri terhadap Usulan Kerja Sama White Shipping Agreement (WSA)/White Shipping Information Exchange (WSIE) dari India;
  - Surat Menko Polhukam nomor R-23/LN.00.00/9/2022 tanggal 19 September 2022 Rekomendasi untuk Tindak Lanjut Perundingan Batas Maritim Indonesia dan Viet Nam;
  - Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor B-3558/LN.00.01/11/2022 tanggal 08
     November 2022 Rekomendasi Kebijakan Pemri terkait Strategi Diplomasi
     Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa dalam Mengantisipasi Dinamika Global;
  - d. Surat Menko Polhukam nomor B-165/LN.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2022. Perihal Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemahanan AOIP dan Penysusunan Pedoman Implementasi AOIP untuk Menjadi Dasar Panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Road Map Implementasi AOIP;



- e. Surat Menko Polhukam nomor B-96/LN.00.03/8/ tanggal 26 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi untuk Melakukan Pemetaan Kapasitas Nasional dan Penguatan Kelembagaan dalam Merespons.
- f. Surat Menko Polhukam nomor B-131/LN.00.03/8/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Penjajakan Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Rencana Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua;
- g. Surat Menko Polhukam nomor B-177/LN.00.02/12/2022 tanggal 27 Desember 2022. Rekomendasi Kebijakan ASEAN Coast Guard Forum, rekomendasi disampaikan ke Kepala Bakamla
- 3) Mendukung Jumlah Forum Regional dan Multilateral yang dipimpin oleh Indonesia Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pimpinan (baik Host, *Co-Host*, *Chair*, *Co-Chair* maupun dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Multilateral) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait pelayanan, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
  - a) Surat Menko Polhukam Nomor: B-25/LN00.02/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 terkait upaya koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dalam persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023;
  - b) Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor B-1482/LN.00.02/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 kepada Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri; Perihal tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) mengenai Tantangan Promosi dan Proteksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kawasan Pasca Pandemi;
  - c) Surat Menko Polhukam nomor B-147/LN.00.01/11/2022 tanggal 8 November 2022. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Bilateral(FKB) ke-6 antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia;
  - d) Surat Menko Polhukam nomor B-3526/LN.00.01/11/2022 tanggal 04 November 2022 Rekomendasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI- Slowakia;
  - e) Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor B-2631/LN.00.01/9/2022 tanggal 1 September 2022 Rekomendasi Tindak Lanjut Pembahasan Scurity Agreement dan Pembentukan Security Dialogue RI- Turkiye;
  - f) Surat Menko Polhukam nomor B176/LN.00.03/12/2022 tanggal 27 Desember 2022. Rekomendasi Hasil Pertemuan Universal Periodic Review ke-4.

# 3. Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti

Rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri yang ditindaklanjuti berjumlah 15 (lima belas) rekomedasi dengan rincian :



- 1) Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik, 6 rekomendasi
- 2) Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa 4 rekomendasi
- 3) Koordinasi Kerja Sama ASEAN, 3 rekomendasi.
- 4) Koordinasi Kerja Sama Multilateral 2 rekomendasi

15 (lima belas) rekomedasi kebijakan bidang Pollugri yang telah ditindaklanjuti, yaitu :

- Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor R-2/LN.00.00/1/2021 telah ditindaklanjuti Kemlu dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan WNI terduga FTF di Turki dan Afghanistan pada tanggal 9-10 April 2022. Rapat juga sekaligus membahas WNI terduga FTF di Irak. Rapat telah menyepakati untuk melakukan persiapan atas dideportasinya WNI dimaksud di Turki dan Irak.
- Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor R-13/LN.00.00/4/2021 telah ditindaklanjuti dengan penyampaian update penanganan pemulangan mahasiswa penerima Beasiswa Otsus.
- 3) KBRI Wellington telah menyampaikan klarifikasi publik di media massa lokal dan anggota parlemen Selandia Baru terkait pemulangan mahasiswa Papua.
  - a) K/L terkait telah menyepakati alternatif strategi penanganan untuk pemulangan mahasiswa yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat teknis.
- 4) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-45/LN.00.00/4/2022 ditindaklanjuti oleh Kemkeu dengan melakukan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) tahap pertama kepada Provinsi Papua pada 22 April 2022. Pemda Papua dhi. BPSDM pada Setda Papua menutup kekurangan dana yang diperlukan menggunakan dana cadangan Provinsi Papua untuk sementara waktu. Deputi I Bidkoor Poldagri Kemenko Polhukam melalui penyelenggaraan Rakor Membahas Keterlambatan Transfer Beasiswa Otsus OAP di Luar Negeri tanggal 28 April 2022. Rakor menghimpun perkembangan atas isu dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan selanjutnya.
- 5) Rekomendasi Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor R-79/LN.00.00/7/2022 tanggal 22 Juli 2022 Rekomendasi untuk Tanggapan Pemri terhadap Rencana Pemulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) dari Suriah oleh Pemerintah Malaysia.
- 6) Rekomendasi Surat Sesmenko Polhukam nomor B-2071/LN.00.00/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan Surat Menko Polhukam nomor B-99/LN.00.00/9/2022 tanggal 2 September 2022 Rekomendasi untuk Sinkronisasi Posisi Pemri terhadap Usulan Kerja Sama *White Shipping Agreement* (WSA)/*White Shipping Information Exchange* (WSIE) dari India.
- 7) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor R-23/LN.00.00/9/2022 tanggal 19 September 2022 Rekomendasi untuk Tindak Lanjut Perundingan Batas Maritim Indonesia dan Viet Nam.
- 8) Rekomendasi Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor B-3558/LN.00.01/11/2022 tanggal 08 November 2022 Rekomendasi Kebijakan Pemri terkait Strategi Diplomasi Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa dalam Mengantisipasi Dinamika Global.
- 9) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-147/LN.00.01/11/2022 tanggal 8 November 2022 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Bilateral(FKB) ke-6 antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia.
- 10) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-3526/LN.00.01/11/2022 tanggal 04 November 2022 Rekomendasi Peningkatan Hubungan Bilateral RI-Slowakia.
- 11) Rekomendasi Surat Deputi Bidkoor Pollugri nomor B-2631/LN.00.01/9/2022 tanggal 1 September 2022 Rekomendasi Tindak Lanjut Pembahasan Scurity Agreement dan Pembentukan Security Dialogue RI-Turkiye.



- 12) Rekomendasi Surat Menko Polhukam Nomor: B-25/LN00.02/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 terkait upaya koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dalam persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kemlu melalui penyelengaraan Rakor Rencana Program Pemagangan Aparatur Sipil Timor Leste dalam rangka Peningkatan Kapasitas Timor Leste terkait Pilar Polkam ASEAN pada Jumat, 3 Juni 2022 melalui surat undangan nomor:06534/KA/05/2022/42 tanggal 30 Mei 2022.
- 13) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-165/LN.00.02/11/2022 tanggal 30 November 2022 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemahanan AOIP dan Penysusunan Pedoman Implementasi AOIP untuk Menjadi Dasar Panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Road Map Implementasi AOIP.
- 14) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-141/LN.00.02/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Rekomendasi Kebijakan Mengkaji kembali Semua Instrumen Hukum mengenai TPPO baik ditingkat Nasional, Regional dan Internasional.
- 15) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-96/LN.00.03/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Rekomendasi untuk Melakukan Pemetaan Kapasitas Nasional dan Penguatan Kelembagaan dalam Merespons Kedaruratan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir (KBRN).
- 16) Rekomendasi Surat Menko Polhukam nomor B-131/LN.00.03/8/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Rekomendasi Penjajakan Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Rencana Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua.



### Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

# 1. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

Sesuai Nota Dinas Inspektur Nomor B-230/PW.03.00/9/2022 perihal Laporan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidkoor Pollugri tahun 2022. Nilai Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidkoor Pollugri tahun 2022 = 76,7 Kategori BB (Sangat Baik).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

- 1.Perencanaan Kinerja
- 2. Pengukuran Kinerja
- 3. Pelaporan Kinerja
- 4. Evaluasi Internal
- 5. Capaian Kinerja

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 sampai dengan 2022

No	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	20,50	21,88	24,25	25,89	28,30	22,5
b.	Pengukuran Kinerja	19,10	20,10	20,10	18,13	18,44	22,2
C.	Pelaporan Kinerja	10,63	10,63	10,63	9,80	10,00	12,00
d.	Evaluasi Internal	6,69	6,69	6,69	7,88	8,06	20,00
e.	Pencapain Sasaran/ Kinerja Organisasi	16,21	16,21	13,09	15,42	15,04	-
	Total Nilai =	73,13	75,51	76,08	77,12	79,84	76,7
	Kategori =	В	В	ВВ	ВВ	ВВ	ВВ

Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2022 turun dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 diimplementasikannya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2022 pada 23 Februari 2023. Pada lembar kerja 2022 terdapat beberapa penilaian implementasi SAKIP Organisasi yang lebih detail dibandingkan dengan LKE sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tersebut, kepada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri direkomendasikan :

- 1. Mereviu Renstra 2020-2024 secara berkala;
- 2. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment yang telah disusun terhadap capaian hasil kerja;
- Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja, serta mengevaluasi indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2021



- 4. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, benchmark, dan konsultasi, serta
- 5. Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik

## 2. Indikator Kinerja 2 : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber data capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Unit Kerja Eselon I oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2022 adalah 35,09.

Tabel 3.5
Rincian Penilaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2021
dan 2022

No	Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
PEN	GUNGKIT	36,30	30,49	35,09
	Pemenuhan	14,60	12,88	14,20
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,82	2,00
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,67	1,75
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,88	0,95
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,34	1,35
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,31	2,45
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,90	2,25
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	1,99	2,45
II.	Reform	21,70	17,61	20,89
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,75	2,95
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50	1,95
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,25	3,55
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,25	1,79
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,07	3,55
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34	365



### 3. Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Berdasarkan Laporan Bagian Tata Usaha dan Umum Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2022 bahwa Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah 4.

Laporan merupakan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada stakeholder Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik internal Kemenko Polhukam maupun external Kemenko Polhukam yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Nilai yang diambil adalah nilai yang paling sering muncul (modus) pada hasil perhitungan survei.

Tabel 3.6.

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 sampai dengan 2022.

Komponen	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Indeks Kepuasan						
Pelayanan	4	4	4	4	4	4
Kesekretariatan						

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan sepanjang tahun 2022. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas Aspek Internal (antara lain Layanan Kepegawaian, Layanan Persuratan, Layanan Kearsipan, Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan Layanan Umum) dan Aspek Eksternal (layanan kepada stake holder diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri).

# 4. Indikator Kinerja 5 : Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Berdasarkan Nota Dinas Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-24/PR.01.00/1/2023 tentang Penyampaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Unit Kerja Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2022 adalah 85,00. Nilai tahun 2022 turun terhadap penilaian tahun 2021 hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penilaian dan bobot penilaian pada tahun 2022 namun tanpa pemberitahuan kepada Unit Kerja. Penurunan juga tidak disertai dengan alasan turunnya nilai dan rekomendasi dalam hal peningkatan nilai. Hal ini membuat Unit Kerja Deputi Bidkoor Pollugri tidak memasukkan indikator kinerja ini pada tahun 2023.



# Tabel 3.7. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2021	Bobot	Nilai 2022
1.	Ketepatan Waktu Dokumen Perencanaan	10,00	7,00	10,00	6,00
2.	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	6,50	10,00	10,00
3.	3. Jumlah Revisi		10,00	10,00	9,00
4.	Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Perencanaan Nasional	20,00	20,00	10,00	6,00
5.	5. Respon Perencana Unit Organisasi		3,50	10,00	6,00
6.	Ketepatan Waktu Dokumen Monev	12,50	11,50	17,50	15,50
7.	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	12,00	17,50	17,50
8.	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen Perencanaan	12,50	12,50	15,00	15,00
9.	9. Respon Bagian Monev Unit Organisasi		12,50	-	-
	Nilai Indeks =	100	95,5	100	85,00

#### C. EFISIENSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputi
- 4 orang Esellon II sebagai Asisten Deputi
- 1 orang Esellon II sebagai Sekretaris Deputi
- 6 orang Esellon III sebagai Kepala Bidang
- 2 orang Esellon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Esellon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 5 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputi masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target saasaran strategis Tahun 2022.



Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 10.173.676.000. Seiring berjalannya waktu terdapa Automatic Adjustment (cadangan pemotongan) anggaran sehingga per 31 Desember 2022 anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp\_8.950.524.000.

Meskipun Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pollugri mengalami Automatic Adjustment (cadangan pemotongan) sebesar 11,53% atau sebesar Rp\_1.173.152.000 dari Pagu awal tahun 2022, hal tersebut tidak menurunkan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pollugri. Penyesuaian-penyesuaian sistem kerja dilakukan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 serta demi tercapainya target kinerja tahun 2022.

#### D. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.950.524.000,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.716.302.484,- (*Delapan Milyar Tuju Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 97,38%dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2022

Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	Jumlah	Realisasi	%
ADO.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.196.649.000	2.135.007.805	97,19%
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	1.939.869.000	1.857.384.051	95,75%
	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.077.703.000	2.033.417.520	97,87%
	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.402.030.000	1.3633.27.660	97,24%
ABE.ABD	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1.334.273.000	1.327.165.448	99,46%
	Total =	8.950.524.000	8.716.302.484	97,38%

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja Tahun 2022, Kedeputian Bidkoor Pollugri didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 15
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran
Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI TA 2022	% Realisasi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan     Pengendalian Bidang Politik Luar     Negeri lintas sektoral yang efektif;	7.616.251.000	7.389.137.036	97,02%
Pemenuhan Layanan Dukungan     Manajemen yang optimal	1.334.273.000	1.327.165.448	99,46%
TOTAL KEDEPUTIAN II 2022	8.950.524.000	8.716.302.484	97,38%

Pagu awal DIPA Deputi Bidkoor Pollugri Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 10.173.676.000. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, maka dalam upaya penanggulanggan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah realokasi anggaran dengan merefocusing anggaran K/L Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan sesuai arahan Presiden RI dalam rapat internal tanggal 16 Mei 2022 dengan agenda Belanja Sibsidi dalam APBN tahun 2022 serta berdasarkan Berdasarkan Nota Dinas Semenko Polhukam Nomor B-93/PR.01/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022, Deputi II Bidkoor Pollugri mendapatkan perubahan anggaran berupa Automatic Adjustmen (cadangan pemotongan) sebesar Rp 1.173.152.000 dari semula Rp 10.173.676.000 menjadi Rp 8.950.524.000. Berikut perubahan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri setelah realokasi anggaran Tahun 2022:

Tabel 3.9.
Perubahan Pagu Anggaran Deputi Bidkoor Pollugri
Tahun 2022

	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Kode	Uraian Output	Pagu 1 Januari 2022 (Rp)	Automatic Adjustment (Rp)	Pagu 31 Desember 2022 (Rp)			
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.449.226.000	252.577.000	2.196.649.000			
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.221.112.000	281.243.000	1.939.869.000			
ABC.003	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.416.811.000	339.108.000	2.077.703.000			
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.587.935.000	185.905.000	1.402.030.000			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal- Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	664.158.000	23.403.000	640.755.000			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Sekretaiat Deputi Bidkoor Pollugri	784.434.000	90.916.000	693.518.000			
Tota	l Pagu Anggaran =	10.173.676.000	1.173.152.000	8.950.524.000			



Capaian realisasi anggaran Deputi Bidkoor Pollugri tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain konflik Rusia-Ukraina yang terjadi pada Februari 2022 serta kenaikan varian *Omicron* Covid-19 mengakibatkan peralihan beberapa kegiatan yang semula telah dijadwalkan. Kebijakan pemblokiran anggaran pada awal tahun serta pembukaan blokir pada akhir bulan Oktober (Triwulan IV) 2022 juga menjadi menyebabkan unit kerja Deputi Bidkoor Pollugri hanya memiliki waktu efektif 2 bulan dalam pelaksanaan kegiatan. Perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 Deputi Bidkoor Pollugri Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

	2019	2020	2021	2022
Pagu	11.850.000.000	8.523.676.00	10.173.676.000	8.950.524.000
Realisasi	10.303.009.696	8.188.403.211	5.139.057.384	8.716.302.484
% Realisasi	90,95%	96,07%	99,88%	97,38%





# BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2022 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2022.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2022 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2022 yang disusun ini dapat dijadikan sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada triwulan maupun tahun yang akan datang.